

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KAKAO DI KABUPATEN LUWU

Sapar¹, Andi Hasbi Munarka², Lanteng Bustami³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo^{1,2,3}

sapar@stiem.ac.id

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah ditemukannya informasi ilmiah agar terwujudnya suatu kelembagaan penyuluhan yang profesional dalam membantu petani meningkatkan pengetahuan tentang usahatani sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan sehingga terwujud petani yang sejahtera baik dalam aspek ekonomi maupun non ekonomi. Kelembagaan penyuluhan yang profesional adalah penyuluhan yang melayani dan “menolong orang-orang agar dapat menolong dirinya sendiri (termasuk keluarga dan masyarakatnya) melalui suatu upaya pendidikan” yang demokratis dan berwawasan pengembangan kemandirian petani (humanistik). Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: diketahuinya faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penyuluh pertanian kakao yang berkaitan dengan kelembagaan penyuluhan dalam peningkatan produktivitas kakao di Kota Palopo. Unit analisis penelitian adalah penyuluh pertanian yang populasinya adalah 133 penyuluh pertanian, dengan jumlah sampel sebesar 47 penyuluh pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dengan menjadikan angket sebagai bahan utama mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Regresi Berganda dengan program SPSS 21.0 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan dan pengembangan staf (SDM) berpengaruh -0,163 terhadap kinerja penyuluh, pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 0,300, pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) -0,051, sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 0,196, Adaptasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 0,573 terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao. Pengaruh keseluruhan variabel (koefisien Determinasi) terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao sebesar 71,0 % sedangkan sisanya sebesar 28,0 % dipengaruhi faktor lain. Simpulan penelitian ini adalah pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian dan adaptasi Balai Penyuluhan Pertanian secara statistik berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian sedangkan penempatan dan pengembangan staf (SDM), pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, dan sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian secara statistik tidak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian, karena itu disarankan kepada stakeholder penyuluhan pertanian kakao untuk memperhatikan faktor kelembagaan penyuluhan untuk menunjang keberhasilan produksi kakao terutama pada aspek pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian dan Adaptasi Balai Penyuluhan Pertanian.

Kata Kunci: Kelembagaan, Kinerja, Penyuluh Pertanian.

1. Pendahuluan

Tugas utama penyuluhan adalah membantu petani di dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pemecahan masalah. Tetapi masalah penyuluhan sekarang adalah kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri. Penyuluh berada pada dua kepentingan yaitu kepentingan petani dan kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan oleh karena itu petani diharapkan meningkatkan produksi tetapi dengan harga yang murah. Kepentingan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan mengusahakan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Penyuluh berada pada dua kepentingan yang saling bertentangan. Selama penyuluh berpihak kepada pemerintah, maka akan timbul konflik kepentingan petani dan pemerintah. Kepercayaan petani kepada penyuluh

akan menurun. Partisipasi petani dalam pembangunan juga akan menurun. Contoh: Petani menginginkan harga buah meningkat karena memiliki warna yang bagus, tetapi pemerintah tidak dapat memenuhinya.

Kinerja penyuluh pertanian dirasakan mulai menurun sejak berlakunya otonomi daerah. Penyuluh pertanian banyak yang beralih fungsi menjadi pejabat struktural atau tetap menjadi penyuluh pertanian tetapi tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada awalnya penyuluh pertanian merupakan aparat pusat yang bekerja di daerah untuk membantu petani di perdesaan. Setelah mengalami perubahan bentuk kelembagaan dengan adanya otonomi daerah, maka saat ini penyuluh pertanian yang langsung membina petani merupakan aparat pemerintah daerah. Beberapa daerah tingkat II menganggap bahwa penyuluh pertanian tidak penting karena tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sehingga beberapa penyuluh pertanian berpindah profesi menjadi aparat kecamatan untuk bertugas sebagai staf administrasi. Penyuluh pertanian yang lainnya menjadi pejabat struktural di dinas-dinas lingkup pemerintah daerah, sehingga pembinaan terhadap petani semakin berkurang.

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat petani adalah lembaga yang mantap dan tangguh sebagai produsen utama segala komoditas pertanian di negeri ini. Ketika pemerintahan terpuruk, jatuh dan bangun; industri dan perdagangan terancam bangkrut dan hancur; tetapi masyarakat tani tetap *exist* dan terus memproduksi. Masyarakat tani akan terus memproduksi dengan atau tanpa intervensi pihak luar. Ini membuktikan bahwa masyarakat petani sebenarnya memiliki kemandirian, juga tentang apa yang harus dan akan mereka lakukan. Faktor dominan yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka adalah kehidupan keluarganya, sedangkan faktor lain yang tidak secara langsung mempengaruhi kehidupan keluarganya tidak akan mempengaruhi keputusan yang diambil, misalnya kebutuhan pangan nasional, masalah devisa nasional, pasaran global dan lain-lain.

Selama ini kegiatan penyuluhan lebih dilaksanakan oleh lembaga penerangan yang bertanggung jawab untuk menjembatani kebijakan pemerintah agar sampai kepada rakyat. Seharusnya penyuluhan lebih mendidik petani agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Organisasi penyuluhan yang sekarang ini ingin menyampaikan kebijakan yang sebenarnya dilakukan oleh lembaga penerangan. Selain itu, kurang terorganisasinya penyuluhan secara baik. Contoh: pada jaman BIMAS dikeluarkan

SK Mendagri-Mentan tahun 1985 tentang pembentukan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) sehingga penyuluh pertanian berada di BPP. Kemudian tahun 1992 penyuluh berada di dinas-dinas sehingga BPP di bagi-bagi sesuai dengan dinas yang ada. Tahun 1996 dikeluarkan SK Mendagri-Mentan tentang pembentukan BIPP (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian). Belum selesai BIPP dibentuk sudah digulirkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Kurangnya pengorganisasian kegiatan penyuluhan menyebabkan kurangnya keberhasilan penyuluhan pertanian.

Menurut Departemen Pertanian, (2015) Indonesia mengalami kekurangan 39 ribu penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelurahan. Saat ini Indonesia memiliki 47 ribu penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, setiap desa wajib memiliki satu penyuluh. Di berbagai negara seperti Thailand, sebanyak 70% dari keberhasilan pertanian ditentukan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian sendiri memiliki fungsi untuk membina petani dalam rangka meningkatkan produktivitas tani. Selain memiliki kekurangan penyuluh, sistem penyuluhan pertanian sendiri belum memiliki koordinasi. Koordinasi tersebut dapat berupa lembaga lain seperti litbang pertanian, perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat. Padahal, para penyuluh dapat menggunakan hasil penelitian dari lembaga tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan tidak memiliki program yang sesuai.

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, hingga saat ini baru 86% kabupaten dan kota yang memiliki kelembagaan tersendiri untuk penyuluh pertanian. Namun, 14% dari lembaga tersebut masih belum memiliki program penyuluhan pertanian yang jelas. Sementara di tingkat kecamatan, baru 69% kecamatan yang memiliki lembaga penyuluhan pertanian.

Para penyuluh juga lebih banyak berorientasi kepada kepentingan perusahaan tertentu. Seperti yang terjadi pada program subsidi pupuk dari pemerintah. Pemerintah justru bekerja sama dengan perusahaan pupuk untuk memberikan subsidi pupuk. Sehingga para petani menggunakan pupuk dari perusahaan yang jauh lebih mahal. Berdasarkan survei Indeks Barometer Sosial 2015, subsidi pupuk merupakan program kesejahteraan pemerintah yang paling rendah di segala aspek. Dalam aspek manfaat, subsidi pupuk hanya dirasakan oleh 58,3% masyarakat. Selain itu, hanya 10,2% masyarakat yang menganggap program ini sudah tepat sasaran.

2. Metode Penelitian

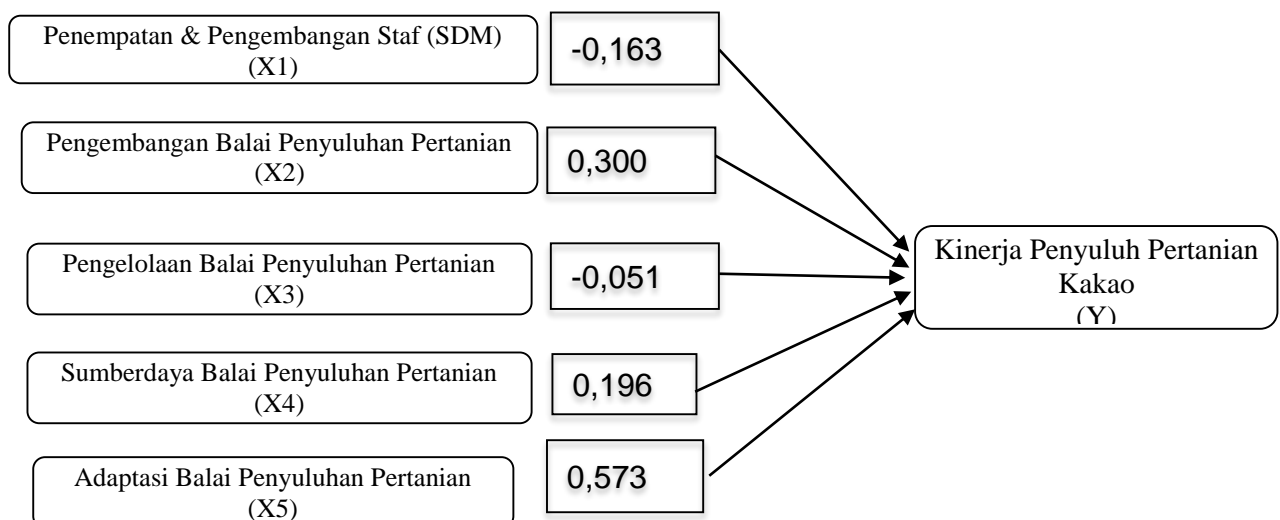
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Penyuluhan Pembangunan (BPP) dan Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Luwu dari bulan September sampai Oktober 2017. Menurut Gay, 1992 untuk penelitian korelasi minimal sampel 10 % dari total populasi. Unit analisis penelitian adalah penyuluh pertanian yang populasinya adalah 133 penyuluh pertanian dengan jumlah sampel sebesar 47 penyuluh pertanian kakao.

Penelitian menggunakan metode survei melalui pengisian kuesioner yang didukung wawancara. Validitas instrumen yang digunakan adalah validitas isi (*content validity*) yang dikonsultasikan kepada lima orang pakar. Hasil perbaikan instrumen ini diujicobakan kepada 15 penyuluh pertanian. Dengan menggunakan uji *Cronbach Alpha* diperoleh koefisien reliabilitas masing-masing sebesar 0,812, yang instrumen tersebut reliabel. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Regresi Berganda dengan program SPSS 21.0

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model hipotetik yang diajukan berasal dari satu peubah bebas dan lima peubah terikat. Setelah dilakukan pendugaan peubah yang berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian, ditemukan model struktural kinerja penyuluh pertanian yang menunjukkan jalur pengaruh antar peubah. Dari model pada Gambar 1, dirumuskan persamaan model struktural kinerja pertanian sebagai berikut :

$$Y = a - 0,163X_1 + 0,300X_2 - 0,511X_3 + 0,196 X_4 + 0,573 X_5.$$



Gambar. Model Struktural Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam Peningkatan Produksi Pertanian Kakao di Kabupaten Luwu

Pembahasan

Pengaruh penempatan dan pengembangan staf (SDM) terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Kakao

Hasil analisis secara parsial dapat disimpulkan bahwa penempatan dan pengembangan staf (SDM) berpengaruh negatif terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao. Hal ini dibuktikan dengan uji secara parsial diperoleh koefisien regresi untuk variabel penempatan dan pengembangan staf (SDM) bernilai negatif (-0,163) yang berarti bahwa setiap peningkatan penempatan dan pengembangan staf (SDM) akan mempengaruhi penurunan kinerja penyuluh pertanian kakao sebesar 0,163 satuan. Sedangkan untuk uji t diperoleh nilai t hitung sebesar -1,272 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu -2,0195 dan signifikansi sebesar 0,211 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penempatan dan pengembangan staf (SDM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Hatta Jamil (2012), Dina Lesmana (2017) yang menyatakan bahwa peubah sumberdaya manusia (SDM) berpengaruh nyata pada program aksi BPP. Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka kedudukan dan fungsi SDM dalam organisasi sangat strategis, karena SDM merupakan motor penggerak sumberdaya lainnya agar organisasi tetap berjalan sesuai misi dan tujuan yang ingin dicapai. Hal itu dikemukakan oleh Griego, Geroy, & Wright, 2000; Ulrich, 1997a, 1997b, *dalam* Kontoghiorghes, Awbrey, Feuriq (2005).

Hasil penelitian ini diperkuat oleh Russel dan Taylor III (2003) yang mengemukakan tentang SDM, dimana kedudukannya sebagai staf/karyawan yang memiliki kebutuhan dan keperluan untuk pengembangan sebagaimana yang diungkapkan bahwa isu strategis sumberdaya manusia meliputi penetapan tingkat keterampilan dan derajat otonomi yang diperlukan untuk bekerjanya sistem produksi, menguraikan ukuran-ukuran pemilihan kebutuhan pelatihan, dan menentukan kebijakan atas evaluasi kinerja, ganti-rugi, dan insentif.

Pengaruh Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Kakao

Hasil analisis secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao. Hal ini dibuktikan dengan uji secara parsial diperoleh koefisien regresi untuk variabel pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bernilai positif (0,300)

yang berarti bahwa setiap peningkatan pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) akan mempengaruhi peningkatan kinerja penyuluh pertanian kakao sebesar 0,300 satuan. Sedangkan untuk uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,213 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,0195 dan signifikansi sebesar 0.033 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Hatta Jamil (2012), Nani Sufiani Suhandi (2008), yang menyatakan bahwa peubah pengembangan BPP secara langsung berpengaruh nyata pada program aksi BPP. Pengaruh pengembangan program dapat terlihat pada kualitas perumusan program penyuluhan pertanian, kuantitas dan kualitas memfasilitasi pelaku utama menyusun RDK dan RDKK serta kemampuan mengelola biaya operasional sebagai energi menjalankan fungsi sebagai penyuluh dan staf BPP.

Hasil penelitian ini juga memperkuat pendapat Rummler dan Brache (Sudarmanto, 2009) bahwa kinerja pada level organisasi terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Richard (2003), Cardy dan Dobbins (1994), Waldman (1994), Campbell (1993), dan Mohrman (1989), mengemukakan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi, unit organisasi tempat orang bekerja. (Muh. Hatta Jamil, 2012).

Pengaruh Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Kakao

Hasil analisis secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh negatif terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao. Hal ini dibuktikan dengan uji secara parsial diperoleh koefisien regresi untuk variabel pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bernilai negatif (-0,051) yang berarti bahwa setiap peningkatan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) akan mempengaruhi penurunan kinerja penyuluh pertanian kakao sebesar 0,051 satuan. Sedangkan untuk uji t diperoleh nilai t hitung sebesar -0,239 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu -2,0195 dan signifikansi sebesar 0,812 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Hatta Jamil (2012) bahwa pengelolaan BPP berpengaruh nyata pada program aksi. BAN-PT (2008) pentingnya tata kelola (governance) sebagai sistem untuk

memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan BPP. Tata kelola yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil sekaligus menjadi elemen penilaian dan sistem tata kelola yang baik. Tata kelola didukung dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta dukungan organisasi, penyuluh, petani/keompok binaan, staf BPP dan *stakeholders*.

Pengaruh Sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Kakao

Hasil analisis secara parsial dapat disimpulkan bahwa sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao. Hal ini dibuktikan dengan uji secara parsial diperoleh koefisien regresi untuk variabel pelatihan bernilai positif (0,196) yang berarti bahwa setiap peningkatan sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) akan mempengaruhi peningkatan kinerja penyuluh pertanian kakao sebesar 0,196 satuan. Sedangkan untuk uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,748 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0195 dan signifikansi sebesar 0,459 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Muh. Hatta Jamil (2012) bahwa peubah sumberdaya BPP berpengaruh nyata pada program aksi BPP.

Sejalan dengan penelitian ini, maka secara umum konsep kinerja organisasi didasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah asosiasi sukarela dari asset produktif, termasuk manusia, sumberdaya fisik dan modal, untuk tujuan mencapai tujuan bersama. (Carton dan Hofer, 2006)

Pengaruh Adaptasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Kakao

Hasil analisis secara parsial dapat disimpulkan bahwa adaptasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao. Hal ini dibuktikan dengan uji secara parsial diperoleh koefisien regresi untuk variabel sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bernilai positif (0,573) yang berarti bahwa setiap peningkatan sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) akan mempengaruhi peningkatan kinerja penyuluh pertanian kakao sebesar 0,573 satuan. Sedangkan untuk uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,891 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,0195 dan signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa variabel sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sapar (2011), Sapar (2012), Muh. Hatta Jamil (2012) bahwa adaptasi berpengaruh nyata pada program aksi BPP. Ada tiga peubah yang mencirikan peubah adaptasi BPP yaitu uji teknologi pertanian, pengembangan masyarakat dan kerjasama dengan lembaga lain. Hasil penelitian dapat membantu kementan RI dan Pemda dalam mencari solusi pengembangan BPP ke depan, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana uji coba teknologi dan memberi keluwesan atau kelonggaran bagi BPP untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai organisasi yang mandiri dan modern sehingga BPP dapat mengembangkan kemampuannya untuk dapat melakukan pengembangan masyarakat dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Pada kondisi tersebut diharapkan BPP dapat menjadi organisasi mandiri yang dapat menjadi motor penggerak dan wadah penopang perekonomian wilayah kecamatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut (1) penempatan dan pengembangan staf (SDM) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao, (2) pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao, (3) pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao, (4) sumberdaya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao, dan (5) Adaptasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian kakao, sehingga disarankan Pemerintah Kabupaten Luwu Cq. Badan Penyuluhan Pertanian agar memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penyuluh pertanian kakao dalam aspek kelembagaan yaitu pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan adaptasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Daftar Pustaka

- [1] Carton RB, Hofer CW. 2006. *Measuring Organizational Performance: Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research*. Massachusetts 01060, USA: Edward Elgar Publishing, Inc.

- [2] Dina Lesmana. 2007. Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda. *Jurnal EPP* Volume 4, Nomor 2, 2007: 24-31
- [3] Kontoghiorghes C, Awbrey SM, Feurig PL. 2005. "Examining the Relationship Between Learning Organization Characteristic and Change Adaptation, Innovation, and Organizational Performance." *Journal Human Resource Development Quarterly*, Vol. 16 No. 2, Summer 2005.
- [4] Muh. Hatta Jamil. 2012. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Sulawesi Selatan* (Disertasi). Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- [5] Nani Sufiani Suhandi. 2008. Kinerja Penyuluh Pertanian di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan* Volume 4, Nomor 2, September 2008
- [6] Russel RS, Taylor III BW. 2003. (*fourth Edition*). *Operation Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- [7] Sucihatiningsih DWP dan Waridin. 2010. Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost (Studi Empiris Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 11, Nomor 1, Juni 2010: 13-29.
- [8] Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [9] Sapar. 2011. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan." *J. Forum Pascasarjana*, Vol 34 No. 4 hal: 297-305
- [10] Sapar. 2012. Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan* Volume 8 Nomor 1, Maret 2012.
- [11] Sapar. 2011. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan." *J. Forum Pascasarjana*, Vol 34 No. 4 hal: 297-305